

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Arba, M. 2017. Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, H. M. 2019. Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. Perihal Undang-Undang. Depok: Rajawali Pers.
- Emirzon, Joni. 2000. Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai. Jakarta: Gramedia.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iskandar, Muzakir. 2020. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kurniati, Nia. 2016. Hukum Agraria: Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.
- Lestari, Putri. 2020. "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila." Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Maria S. W. 1994. Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ma'aruf, Umar. 2010. Politik Hukum di Bidang Pertanahan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra, Samudra, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden. 2020. "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1.
- Tripa, Sulaiman. 2019. Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum. Aceh: Bandar Publishing.
- Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.

- Rahman, Nidar, dan Sulaeman. 2012. *Etika Bisnis: Tinjauan pada Etika Profesi Penilai*. Bandung: Lembaga Penerbit Laboratorium Akuntansi FPEB UPI.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia." Jakarta: Kompas.
- La Porta, R. 2000. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics*, Vol. 58 No. 1.
- Ramadhani, Rahmat. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- Sihombing, Eka N. A. M. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-12)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, Rahayu. 2016. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Yustisia*, Vol. 5 No. 2.
- Sulaeman, Abdullah. 2010. *Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaman, Nurus. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Petunjuk Teknis Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (SPI 204).

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. Putusan Nomor 372 K/TUN/2021 tentang Sengketa Keberatan atas Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. Putusan Nomor 3454 K/Pdt/2017 tentang Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Putusan Nomor 1766 K/Pdt/2018 tentang Sengketa Kepemilikan dan Ganti Kerugian atas Tanah Terdampak Proyek Pembangunan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

D. Internet

“MAPPI: UU Penilai untuk Lindungi Kepentingan Publik.” Diakses 1 Maret 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita-media/baca/13184/MAPPI-UU-Penilai-Untuk-Lindungi-Kepentingan-Publik.html>

“8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum.” Hukum Online. Diakses 1 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>